



Batasi Sampah ke TPA Piyungan

■ Pemkot Yogya Kembangkan Sejumlah Titik TPST

YOGYA. TRIBUN - Pemkot Yogyakarta bakal mengembangkan sejumlah titik Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang tersebar di wilayahnya. Pengembangan ini sebagai solusi menghadapi darurat sampah.

Sebagai informasi, dengan luas lahan yang sangat terbatas, TPST yang rata-rata berbasis kewilayahan tersebut baru bisa mengakomodasi upaya pengelolaan sampah di sekitar lingkungan saja.

Penjabat (PJ) Wali Kota Yogyakarta, Singih Raharjo, menjelaskan, beberapa waktu lalu dirinya sudah mengunjungi beberapa TPST yang kedepan masuk dalam rencana pengembangan Pemkot. Pengembangan deretan TPST kecil ini pun diyakini menjadi langkah paling realistis, mengingat wacana pengadaan lahan di luar daerah sampai sejauh ini ternyata tak kunjung membuahkan hasil.

Satu di antara yang bakal dikembangkan ialah TPST Karang Miri, yang berlokasi di Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. "Kami sudah survei, di sana sudah ada embrio yang selama ini menyelesaikan masalah sampah di dua RW, de-

KELOLA LIMBAH

- Pemkot Yogyakarta bakal mengembangkan sejumlah titik TPST di wilayahnya.
- Penda DIY memin-ta kabupaten/kota batasi jumlah sampah yang dibuang ke TPA Piyungan.

ngan beberapa metode sekaligus, jadi tinggal ditunggu," ketanya, Minggu (3/9).

Dia menjelaskan, TPST Karang Miri mulai digerakkan warga masyarakat setempat sejak 2013 lalu dengan mengandalkan metode pengolahan limbah seperti blokonsersi maggot, maupun komposter. Dengan track record yang sudah terbukti, ditambah lahan yang masih cukup tersedia, TPST Karang Miri dapat dikembangkan lagi untuk ikut ambil bagian dalam penyelesaian sampah di level Kelurahan.

"Luas lahan masih cukup, bisa ditambah 10-20 ton sampah yang diolah di sana. Tapi, tentunya, dengan perencanaan yang lebih matang, entah itu dari sisi lokasi, ataupun peralatannya," ujarnya.

Tidak berhenti sampai di situ, TPST 3R (Reuse, Reduce, Recycle) Nitikan yang bergerak di bawah pengelolaan Pemkot Yogya pun diwacanakan untuk dikembangkan kembali kapasitasnya.

Menurutnya, upaya pengembangan beberapa TPST kecil harus dilakukan, karena Kota Yogya terkendala keterbatasan lahan, sehingga sulit merealisasikan lokasi pengolahan limbah berskala besar. Sementara, penajakan selam dua tahun terakhir, untuk pengadaan lahan di daerah lain pun menemui jalan buntu, serta urung terealisasi.

Desentralisasi

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsano, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta untuk membatasi jumlah sampah yang dibuang ke TPA Piyungan.

Caranya dengan mewujudkan desentralisasi pengolahan sampah sehingga sebagian besar produksi sampah dapat dikelola oleh masing-masing wilayah. Langkah itu diperlukan untuk memperpanjang usia TPA Piyungan di Bantul yang telah mengalami kelebihan kapasitas.

"Kita semua harus menahan timbunan sampah di Sleman dan Bantul untuk bisa dilakukan secara desentralisasi, termasuk di Kota Yogya. Sehingga kalau toh besok (TPA Piyungan) dibuka, tonasenya harus dibagi bersama. Kalau tidak TPA Piyungan transisi satu tidak akan berumur panjang," jelas Beny.

Beny mengungkapkan, TPA Piyungan di masa normal bisa menampung sebanyak 700 hingga 1.000 ton sampah dalam sehari. TPA tersebut juga menjadi tumpuan bagi tiga wilayah yakni Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. **(aka/tro)**

Belum Beroperasi Normal

TPA Regional Piyungan di Kabupaten Bantul dipastikan tidak akan dioperasikan secara normal seperti saat sebelum dilakukan penutupan. Seperti diketahui, Penda DIY memutuskan untuk menutup TPA Piyungan sejak 23 Juli hingga 5 September 2023 mendatang karena TPA tersebut mengalami kelebihan kapasitas.

Meskipun ditutup, khusus zona transisi satu tetap dibuka secara terbatas untuk menerima sampah dari Kabupa-

ten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta dengan kuota sebanyak 150 ton sehari.

Skema tersebut kemungkinan akan terus berlanjut setelah 5 September 2023.

"Jadi (total sampah yang akan dibuang ke Piyungan) totalnya akan sekitar 180 an-ton sehari, jadi di bawah 200 (ton). Kuotanya kalau bisa menurun sesuai dengan perintah bapak gubernur," ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY Kuncoro Cahyo Aji, Minggu (3/9). **(tro)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005